



Penjaminan **MUTU** DI PERGURUAN **TINGGI ISLAM**

Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi

Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.

Editor:
Muhammad In'am Esha

**Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Islam
Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi
© UIN-Maliki Press, 2016**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All Right Reserve

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagai atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

**Editor: Muhammad In'am Esha
Layouter: @neiyarahayu**

**UMP 16002
ISBN 978-602-1190-62-3
Cetakan I: Desember 2016**

**Diterbitkan pertama kali oleh
UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile +62341573225
Email: uinmalikipress@gmail.com
Website: <http://www.uin-malang.ac.id>**

DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR.....	iii
PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI.....	xi

Bagian Pertama

RANAH IDEALITAS DAN KONSEPTUAL

PENJAMINAN MUTU MENUJU WORLD UNIVERSITY

Menjadikan Perguruan Tinggi Islam Unggul Dan Menang Bersaing Imam Suprayogo	3
Penjaminan Mutu: Ikhtiar Mempersiapkan UIN Maliki Malang Menuju World Class University Muhtadi Ridwan.....	15
Transformasi Bisnis Perguruan Tinggi Islam Menuju Cita World Class University Sugeng Listyo Prabowo.....	21
Konsep Manajemen Mutu Pendidikan dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i) Baharuddin ..	43
Penjaminan Mutu dan Ideologi Perguruan Tinggi Islam Halimi Zuhdy	59

Bagian Kedua

RANAH FILOSOFIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU

Falsafah Kebijakan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi	
Muhammad In'am Esha	73
Menjaga Khittah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Perang Mutu Kelembagaan	
Muhammad Miftahusyaian.....	87
Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Kreator Mutu	
Angga Teguh Prastyo.....	97
Urgensi Manajemen Berbasis Mutu pada Lembaga Pendidikan Islam	
Nurul Yaqien	105
The Unity of Knowledge pada Sistem Pendidikan Islam Aniek Rahmaniah.....	131
Pendidikan Tinggi Bermutu Berbasis Keunikan Individu (Inspirasi dari Paradigma Kecerdasan Jamak)	
Abdul Halim Fathani.....	143

Bagian Ketiga

RANAH SISTEM MANAJEMEN PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU

Model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	
Slamet.....	161
Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Melalui Self-branding dan Benchmarking	
Danial Hilmi	187



PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI ISLAM MELALUI *SELF - BRANDING* DAN *BENCHMARKING*

Danial Hilmi

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: danielhilmi@gmail.com

A. Pendahuluan

Pendidikan memberikan perannya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, pola kehidupan yang mencerminkan pendidikan harus dibina dan ditanamkan pada seluruh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan amanah yang telah diembankan oleh para pendiri bangsa.

Pola kehidupan bermasyarakat dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikannya, sehingga tidak menutup kemungkinan interaksi antara manusia terkategorisasi dalam sebuah gradasi komunikasi yang baik. Perguruan tinggi menempati sistem pendidikan tertinggi yang akan mengantarkan peserta didiknya menjadi manusia yang sesungguhnya dengan mendayagunakan akal dan fikirannya untuk dapat memecahkan persoalan dan dinamika di masyarakat.

Penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam diharuskan menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakannya, diperlukan upaya sungguh-sungguh agar cita-cita yang dicanangkan oleh perguruan tinggi dapat tercapai dengan maksimal.

Melalui peran perguruan tinggi keagamaan Islam, maka diharapkan dinamika di masyarakat dapat diselesaikan dengan bijak dan sesuai dengan arah berfikir yang rasional. PTKI dituntut untuk membenahi persoalan terkait dengan urusan keagamaan Islam yang tentunya harus dimiliki baik oleh dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa nantinya yang akan terjun ke masyarakat. Di era modern ini, PTKI tidak hanya membincang tentang urusan agama, namun juga diharapkan mampu berbicara tentang sains dan teknologi yang pada dasarnya al-Qur'an sudah membahasnya sejak abad 14 yang lalu.

Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam tidak lain adalah memiliki kompetensi yang memadai baik dalam bidang yang dipelajari maupun ilmu agama yang cukup. Berbicara tentang kompetensi berarti berbicara mengenai mutu yang tentunya akan dapat dicapai jika seluruh bagian yang ada dalam perguruan tinggi tersebut menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang sesuai dengan standar.

Seiring perjalanan waktu, diakui atau tidak ternyata terjadi penggerusan (abrsi) atas kompetensi yang telah kita miliki. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan teknologi dan pola kehidupan telah menjadikan kompetensi para siswa tertinggal dan ketinggalan zaman. Apa yang dimilikinya ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan. Pada saat inilah kita dituntut untuk dapat menyesuaikan diri. Jika tidak, maka proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan akan ketinggalan zaman juga¹.

Kajian mutu pendidikan selalu menjadi perbincangan yang hangat dimana perkembangan manusia yang mengalami perubahan gaya yang berbeda-beda sehingga menyebabkan peningkatkan mutu tidak vacum. Pada zaman penjajahan ataupun pasca penjajahan tidak begitu menekankan pada mutu karena mereka yang belajar di sebuah lembaga pendidikan ataupun di pesantren tidak dituntut memiliki mutu tertentu.

¹ Mohammad Saroni, 2011, *Personal Branding Guru*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm. 119

Di era modern, persoalan mutu menjadi titik utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Karena keberhasilan menjalankan mutu, maka akan berdampak pada kompetensi yang dimiliki oleh lulusannya. Pendidikan tinggi tidak bisa anti dengan teknologi karena segala aktivitas manusia sudah dapat direkam oleh dunia teknologi yang mau tidak mau relung-relung pendidikan pun tidak bisa lepas dari peran teknologi juga.

Amanah yang dititipkan oleh orang tua dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam tidak bisa dianggap remeh, justru harus dikawal dengan sebaik-baiknya untuk menjaga citra lembaga itu juga. Disatu sisi, orang tua sebagai pelanggan juga sebagai stakeholder yang akan menjadi pemakai para lulusannya. Oleh karena itu, menjaga mutu tetap harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dalam mengawal pelayanan terbaik.

B. Menakar Kapasitas Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Islam

Perjalanan hidup manusia tidak lepas dari adanya interaksi dengan manusia yang lainnya. Pola interaksi mempengaruhi adanya kelompok tertentu yang tentunya sesuai dan selaras dengan bidang maupun kesamaan yang lainnya. Seiring berjalaninya waktu, keinginan kelompok manusia yang membentuk komunitas memberikan peluang kepada anggota baru untuk bergabung dengan memiliki kriteria atau standar tertentu agar tercipta keseragaman dalam berperilaku.

Standar dan kriteria telah mengantarkan kelompok manusia kepada hadirnya mutu terutama di era modern ini. Sebagaimana terjadi di sebuah perusahaan, lembaga pendidikan dan tempat lainnya yang memberikan peluang kerja bagi mereka yang punya mutu tertentu. Oleh karena itu, di saat kompetisi suatu institusi berjalan kompetitif maka pada saat itulah insititusi tersebut harus memiliki mutu yang memadai.

Mutu merupakan persepsi pelanggan sehingga pengertian mutu tidaklah sama antara orang yang satu dengan yang lain tergantung sudut pandangnya. Dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan bersifat relatif dan sangat tergantung pandangan dari pelanggan lembaga pendidikan tersebut.²

² Engkoswara dan Aan Komariah, 2010, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. Hlm. 305.

Dalam bidang pendidikan, mutu kerap menjadi hal yang paling banyak disorot. Hal ini mengingat tugas dan fungsi sebuah lembaga pendidikan yang berat yaitu mengantarkan peserta didik dan lulusannya menjadi berkualitas dan bermutu. Untuk menjadikan lulusan bermutu, maka perlu adanya tahapan dimana tenaga pendidik juga diharapkan memiliki mutu yang memadai yang dapat memberikan inovasi dalam pengajarannya yang juga sesuai dengan perkembangan zaman.

Tenaga pendidik merupakan sosok yang secara langsung berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas proses dan hasil proses pendidikan di negeri ini. Setiap hal yang disampaikan oleh guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah semata-mata untuk masa depan yang lebih baik, bagi kehidupan sang anak dan bangsa ini. masa depan anak dan bangsa ini sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Jika mereka tertangani dengan baik, masa depan merupakan sesuatu yang sudah tertata. Namun, jika ternyata tidak tertangani, tentu kondisi terjelek akan dihadapi³.

Dosen sebagai tenaga pendidik yang secara khusus termasuk tenaga fungsional pendidikan termasuk yang paling sentral dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Karena kompetensi terkait dengan bagaimana konten yang harus difahami dan disampaikan kepada mahasiswa. Lulusan yang bermutu dengan beragam kompetensi yang dimiliki tidak lepas dari peran dosen sebagai pengarah dan perancang pembelajaran di dalam kelas.

Dalam menjalankan manajemen mutu pendidikan, diperlukan sebuah usaha yang efektif dan sistematis. Pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif dalam rangka terwujudnya mutu yang baik diperlukan tercapainya karakteristik sebagai berikut: 1) proses belajar mengajar mempunyai efektifitas yang tinggi, 2) kepemimpinan yang kuat, 3) lingkungan yang aman dan tertib, 4) pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif, 5) memiliki budaya mutu, 6) memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis, 7) memiliki kewenangan (kemandirian), 8) partisipasi yang tinggi dari warganya dan masyarakat, 9) memiliki keterbukaan manajemen, 10)

³ *Op. Cit.* Hlm. 125

memiliki kemauan untuk berubah, 11) melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, 12) responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, 13) memiliki komunikasi yang baik, 14) memiliki akuntabilitas, dan 15) memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas⁴.

Lembaga pendidikan tinggi Islam diharapkan dapat menjalankan pengelolaan pendidikan yang memiliki karakteristik yang yang baik. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik manakala inovasi pendidik juga baik. Pengelolaan akan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai dengan efektif jika kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat serta mampu mengarahkan pada cara yang tepat. Pembiasaan juga menjadi hal penting untuk dilakukan khususnya budaya aman dan tertib, dinamis dalam berperilaku, cerdas dalam bekerja secara tim, partisipasi warga yang baik, terbuka, responsif, memiliki kemauan yang kuat serta komunikasi yang baik serta terukur agar terhindar adanya kesalahan dalam bertutur kata.

Menurut Munadi (1999) manajemen mutu terpadu perlu menjalankan empat prinsip berikut ini: 1) Perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus mengumandangkan peningkatan mutu, 2) Kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, 3) Prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, 4) Lembaga pendidikan harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional⁵.

Prinsip-prinsip yang harus dicapai dalam manajemen mutu terpadu secara umum harus memperhatikan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan tetap membawa misi peningkatan mutu pendidikan. Kualitas mutu dapat tercapai dengan menimbang kebutuhan mahasiswa sebagai costumer dan dipertemukan dengan visi dan misi perguruan tinggi yang sinergis. Hal-hal ini akan dapat tercapai dengan baik khususnya dalam manajemen mutu dengan menaruh perhatian kepada kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa terkait ilmu pengetahuan, keterampilan serta sikap dan

⁴ Prim Masrokan Mutohar, 2013, *Manajemen Mutu Sekolah; Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. 1. Hlm. 129

⁵ Ibid. Hlm. 136

etika yang harus dijalankan dengan memiliki sikap yang mencerminkan kematangan profesional.

Lembaga pendidikan sebagai industri jasa dari sudut pandang penerapan Manajemen Mutu Terpadu (MMT), dituntut untuk mengutamakan pelayanan terbaik yang didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) berorientasi pada kebutuhan dan harapan pengguna jasa, 2) bekerja secara rutin dalam proses manajemen, 3) pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan data, 4) *continuous improvement*, dan 5) perbaikan yang konsisten untuk memenuhi dan berusaha melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan. Prinsip-prinsip tersebut mempunyai tujuan pokok untuk mencegah terjadinya kesalahan dan perbaikan mutu secara berkelanjutan⁶.

Analisis kebutuhan masyarakat sebelum didirikan lembaga pendidikan tinggi harus dilakukan mengingat pengguna jasa hanya akan menggunakannya jika sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu diupayakan mengakomodasi kebutuhan pasar serta secara terpadu dengan menjalankan proses manajemen sebaik-baiknya. Seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu menentukan kebijakan dengan melihat kembali data dan fakta di lapangan agar sesuai dan tepat dalam setiap kebijakan yang diambil. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kemauan untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik dan selalu mengembangkan diri menjadi lebih baik juga agar mutu lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan manajemen mutu terpadu, setidak-tidaknya sebuah lembaga pendidikan harus memperhatikan delapan elemen mutu yang sangat penting, yaitu: 1) informasi mutu harus digunakan untuk meningkatkan mutu, 2) otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, 3) tersedia hadiah atas keberhasilan, 4) kerjasama bukan persaingan, kerjasama harus menjadi basis, 5) warga sekolah harus aman dalam bekerja, 6) harus tersedia iklim

⁶ Moch. Idochi Anwar, 2013, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 20

keterbukaan, 7) gaji harus adil dan 8) warga lembaga pendidikan harus merasa saling memiliki⁷.

Elemen penting pendidikan tinggi Islam untuk tercapainya mutu yang terstandar perlu dilakukan *browsing* informasi yang relevan dengan mutu kekinian. Tugas yang tertuang secara jelas dalam sebuah manajemen mutu yaitu pentingnya tanggung jawab yang tertanam pada diri masing-masing diri, kelompok, bagian maupun seluruh civitas akademika itu sendiri.

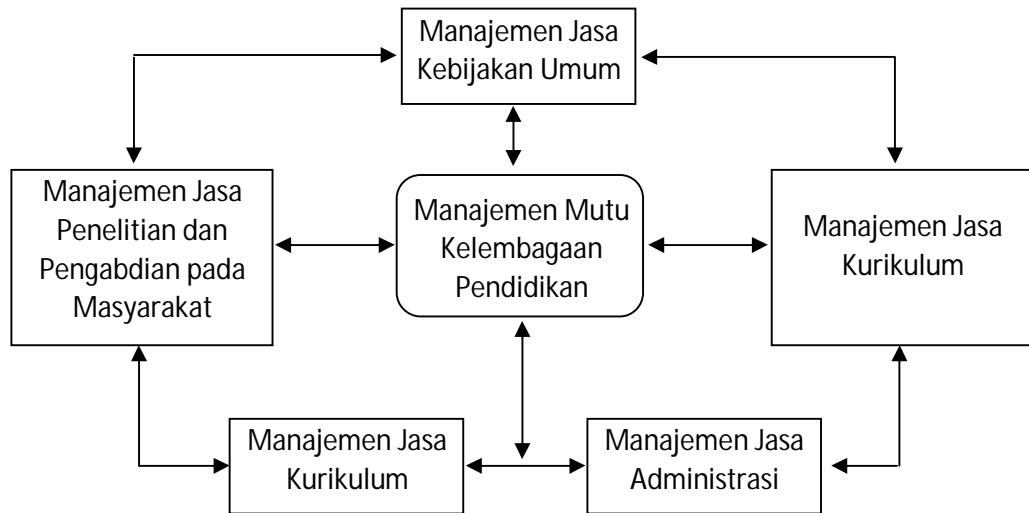
Sebagaimana amanat yang diemban oleh masing-masing warga perguruan tinggi, maka setiap pekerjaan yang dilakukan seperti prestasi dosen tentang pengajaran dan penelitian, maupun pegawai yang telah bekerja dengan total dan memberikan pelayanan yang baik perlu diberikan hadiah atas prestasinya dan keberhasilannya dalam menjalankan tugas.

Salah satu poin penting dalam manajemen mutu pendidikan tinggi yaitu terwujudnya keterbukaan masing-masing personal untuk melaporkan apa yang dilakukan dengan obyektif serta menjalankan peranya dengan efektif dan efisien sehingga kompensasi yang diterima sesuai dengan apa yang dikerjakan. Diantara poin penting juga yaitu adanya kerjasama antar lembaga untuk saling memberi (*take and give*) dimana informasi terbaru bisa didapatkan, kemudian juga keharusan merasa memiliki agar masing-masing warga kampus dapat menjalankan tugasnya, menjaganya dan ikut memikirkan hal terbaik buat lembaganya.

Dengan mengambil standarisasi mutu kelembagaan pendidikan sebagai salah satu aspek dari Manajemen Mutu Terpadu (MMT) pendidikan, maka sebuah model standarisasi yang relevan didiskusikan dalam hal ini adalah Model ISO 9000. Menurut model ini, operasi MMT Pendidikan memiliki empat aspek jasa pendidikan dengan integrasi sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut⁸:

⁷ M. Sashkin & K.J. Kiser, 1993, *Putting Total Quality Management to Work*, San Francisco: Berret-Koehler Publisher. p. 77

⁸ Op. Cit. Hlm. 20



Gambar 1. Spektrum MMT Pendidikan Berdasarkan Model ISO 9000

Pendidikan tinggi memiliki tugas menjalankan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi. Dalam hal ini, PTKIN melaksanakan perannya dalam mengawal masyarakat melalui kegiatan keagamaan juga. Proses manajemen mutu jasa pendidikan memang perlu memperhatikan kualitas komponen-komponen yang ada di dalamnya. Upaya peningkatan mutu perlu sasaran tembak yang tepat seperti mutu dosen, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, jasa kurikulum dan administrasi yang mengharuskan peran pemimpin untuk mengatur yang sesuai dengan standarnya.

Dalam penjaminan mutu lembaga pendidikan harus dilakukan perencanaan strategis yang dapat mengukur kualitas lembaga tersebut. Perencanaan tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di dunia bisnis atau industri, hanya saja diperlukan pemaknaan yang tepat guna diadaptasikan berdasarkan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut⁹.

Perencanaan strategis menjadi poin penting dalam mewujudkan manajemen mutu yang baik. Mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan merupakan suatu hal yang urgent untuk menata dan mengelola mutu sebuah lembaga pendidikan tinggi. Perlu

⁹ Marmar Mukhopadhyay, 2005, *Total Quality Management in Education*, New Delhi: Sage Publication. Hlm. 160

juga diketahui siapa saja mahasiswa yang akan belajar disini dengan mewujudkan apa saja yang dibutuhkan agar memberi manfaat baik bagi mahasiswa maupun pengelola perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) didorong menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu dalam hal pelayanan administrasi dan akademik, sarana dan prasarana serta proses pembelajaran dan mendukung mutu lulusan, dosen dan seluruh pegawai sehingga menjalankan tugas semaksimal mungkin dengan menanamkan kesadaran pada masing-masing individu. Mutu yang diwajibkan ada pada diri mereka juga dalam hal spiritual keagamaan yaitu mampu menjalankan ibadah dengan sempurna dan memiliki kemampuan mempelajari dan mendalami keilmuan agamanya melalui kemampuan membaca kitab secara mandiri. Kompetensi penguasaan kepada pengetahuan agama menjadi kewajiban bagi seluruh lulusan sebuah pendidikan tinggi Islam.

Dalam menjalankan manajemen mutu lembaga pendidikan, peran pemimpin menjadi poin sentral dalam setiap langkah menuju kesuksesan mengawal kualitas. Peter dan Austin (1986) memberikan atribut kepemimpinan pendidikan sebagai berikut¹⁰:

1. Visi dan simbol; kepala satuan kependidikan harus mengkomunikasikan nilai-nilai lembaga pendidikan kepada seluruh warga atau civitas akademiknya dan masyarakat luas.
2. *Management By Walking About* (MBWA); gaya kepemimpinan ini dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan.
3. *For the Kids* (untuk anak-anak); pendidikan sama dengan akrab dengan pelanggan utama lembaga pendidikan yaitu siswa dan mahasiswa.
4. Otonomi, percobaan, dan memaafkan kesalahan; seorang kepala satuan kependidikan harus berani mendorong inovasi tenaga pendidik dan kependidikannya untuk belajar dari kesalahan sehingga lembaga pendidikan memiliki inovasi yang lebih baik.

¹⁰ Husaini Usman, 2009, *Manajemen; Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 581

5. Menciptakan suasana kekeluargaan; kepala lembaga pendidikan membutuhkan komunikasi dalam suasana yang akrab penuh kekeluargaan dengan warga atau civitas akademikanya di dalam dan diluar lembaga.
6. Perasaan menyeluruh, irama, kemauan besar untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan, intensitas, dan penuh perhatian; hal ini adalah mutu personal mendasar yang dibutuhkan oleh pemimpin pendidikan.

Proses manajemen mutu perguruan tinggi keagamaan Islam dituntut harus mampu mewujudkan semangat kekeluargaan agar terjadi suasana yang akrab antar sesama warga civitas akademika, oleh karena itu peran pemimpin adalah sangat sentral untuk merealisasikannya. Disamping itu, pemimpin PTKI yang mengawal mutu lembaganya juga harus menanamkan visi dan misi yang diemban kepada seluruh warga kampus agar berjalan dengan maksimal.

Kemauan besar suatu lembaga perguruan tinggi Islam pasti telah dirancang sedemikian rupa yang mana semangat berinovasi dan bereksperimen harus dilakukan agar tujuan besar itu dapat terwujud. Monitoring dan pendampingan perlu difungsikan khususnya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa sebagai pelanggan yang mengharapkan kebutuhannya untuk belajar dapat direalisasikan dengan baik.

Namun penyusunan dan perencanaan suatu program pendidikan di PTKI harus sesuai standar yang berlaku. Standar tersebut perlu diperhatikan agar komitmen untuk maju dan berkembang dapat berjalan dengan baik. Hal ini perlu dilakukan studi banding atau melihat kembali bagaimana konsep standar yang telah dituangkan dalam badan standar mutu.

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi¹¹.

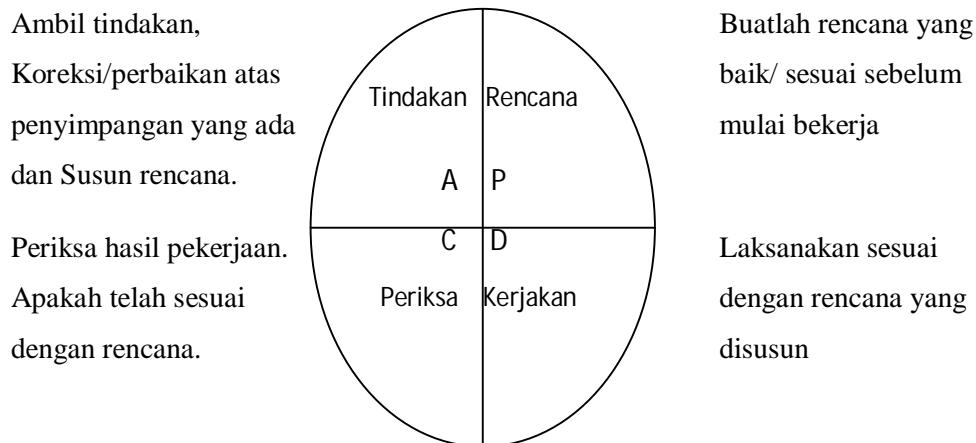
¹¹ Direktorat Penjaminan Mutu Dikti, 2016, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, Jakarta: Dit. Penjaminan Mutu. Hlm. 9

Dalam menjalankan proses pendidikan di sebuah perguruan tinggi Islam, maka lembaga tersebut harus mampu melakukan singkronisasi antara kebutuhan masyarakat, visi dan misi perguruan tinggi tertentu, standar yang dibebankan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini memerlukan pemikiran yang panjang mengingat empat hal ini kadangkala terdapat perbedaan.

Singkronisasi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi, akan menentukan arah kebijakan dalam menugaskan kepada para tenaga pengajar dan tenaga kependidikannya agar menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah kebijakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan mutu yang tepat dengan melakukan pengawasan yang baik dan terukur sehingga cita-cita dan harapan pendirian perguruan tinggi tepat sasaran.

Proses pengelolaan mutu lembaga pendidikan, diperlukan pengawasan yang menyeluruh. Tumbuh kembangnya pengawasan tersebut membutuhkan mentalitas dasar tertentu yang merupakan langkah awal sebelum melaksanakan langkah-langkah kerja sehingga mampu mempercepat terciptanya iklim yang sehat. Secara umum, ruang lingkup mentalitas dasar pengawasan terpadu adalah sebagai berikut: 1) kerjasama dan partisipasi, 2) kesadaran pentingnya mutu, 3) kendali mutu (*Plan, Do, Check dan Act*), 4) kendali mutu proses-hasil, 5) tidak menyalahkan siapa pun, 6) konsep prioritas, 7) pelanggan adalah raja, 8) berbicara berbasis data, 9) tindakan pencegahan dan perbaikan, 10) kendali mutu dimulai dengan sasaran kuantitatif, 11) konsep pemasaran, 12) prosedur dan standarisasi tertulis dan 13) hubungan harmonis antara atasan dan bawahan. Pengelolaan pendidikan harus memperhatikan proses pengawasan sebagaimana tertuang dalam gambar berikut¹²:

¹² Husaini Usman, *Op. Cit.* Hlm. 526



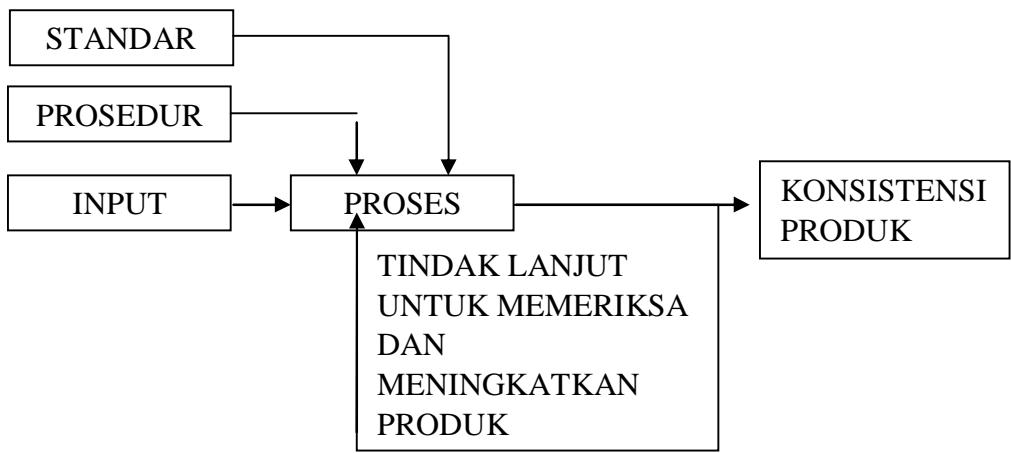
Gambar 2. Pengelolaan Mutu Lembaga Pendidikan

Pengelolaan mutu lembaga pendidikan harus dilakukan perencanaan yang sistematis dan tepat. Perencanaan dimaksudkan agar tercapai segala tujuan dan prinsip yang ingin dibangun melalui lembaga pendidikan tersebut. Pelaksanaan mutu dapat divisualisasikan berdasarkan perencanaan yang dibuat. Agar proses pengelolaan mutu berjalan dengan baik dan maksimal, maka perlu dilakukan pemeriksanaan yang cermat sehingga tidak ada celah bagi adanya kesalahan sedikit pun. Pada tahap selanjutnya, tindakan menempati posisi yang penting dimana segala perencanaan dan pengawasan telah ditanamkan dengan baik.

C. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Melalui *Self-branding* dan *Benchmarking*

Proses penjaminan mutu dimulai dengan penetapan standar, prosedur dan input suatu sistem, sementara produk dari proses penjaminan mutu tersebut adalah konsistensi antara standar, prosedur dalam proses dengan standar, prosedur dalam input yang telah ditetapkan sebelumnya. Derajat konsistensi antara berbagai standar mutu yang dijanjikan dalam input dengan pelaksanaan dalam proses, merupakan umpan balik dalam menindaklanjuti terutama untuk memeriksa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang dilaksanakan. Dalam melakukan proses penjaminan mutu, maka sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam harus melakukan berbagai langkah sebagai berikut¹³:

¹³ Danny Meirawan, *Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional Dalam Otonomi Pendidikan*. Makalah Konaspi VI. Bandung: UPI. Hlm. 7



Gambar 3. Proses Penjaminan Mutu

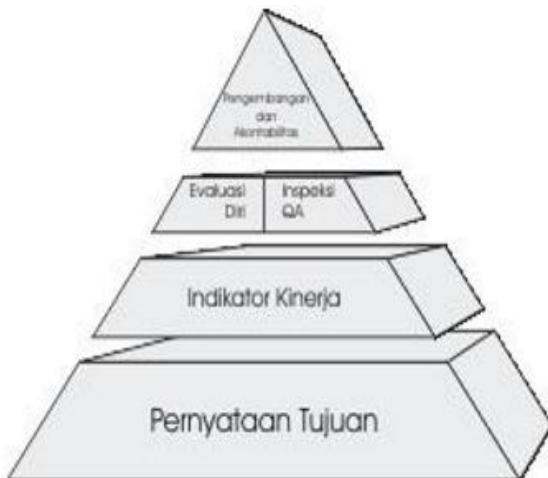
Penjaminan mutu akan berjalan dengan baik jika proses pelaksanaannya berjalan dengan baik pula. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan proses penjaminan mutu yaitu adanya standar yang tepat, penetapan prosedur yang terarah serta input yang memadai agar dapat menjalankan proses.

Siklus penjaminan mutu dimulai dengan penetapan standar mutu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya standar ini dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin agar dapat terpenuhi. Untuk melihat kemajuan pelaksanaan standar tadi dan untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi diri dilakukan terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan kaitannya dengan upaya pemenuhan standar. Tahapan selanjutnya adalah Audit Mutu Akademik Internal untuk melihat kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil-hasil yang diperoleh dari tahapan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu internal serta ditambah dengan masukan dari seluruh stakeholders , digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan mutu¹⁴.

Penjaminan mutu internal dapat mengantarkan suatu lembaga pada proses penjaminan mutu yang baik, sedangkan penjaminan mutu eksternal memberikan

¹⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006, *Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*, Jakarta: Ditjen Dikti. Hlm. 43

evaluasi atas terselenggaranya pendidikan. Namun dalam menjalankan mutu, diperlukan upaya yang tepat dan terarah yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, berikut ini merupakan kerangka kerja penjaminan mutu lembaga pendidikan:



Gambar 4. Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan¹⁵

Dalam menjalankan proses penjaminan mutu lembaga pendidikan utamanya perguruan tinggi dibutuhkan kerangka kerja yang cukup memadai agar dalam dilaksanakan dengan baik. Untuk merealisasikannya, sebuah perguruan tinggi harus memiliki kerangka kerja penjaminan mutu yang berlandaskan ciri-ciri sebagai berikut¹⁶:

1. Penjaminan mutu didasarkan atas indikator-indikator kinerja yang bersifat umum, terbuka dan obyektif yang dirumuskan berdasarkan pernyataan-pernyataan tujuan yang dijadikan sebagai alat penilaian kualitas lembaga pendidikan.
2. Penjaminan mutu dilakukan melalui proses yang transparan dan interaktif melalui penilaian diri dan inspeksi penjaminan mutu.
3. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan berbagai aktivitas dalam proses manajemen penjaminan mutu serta nilai-nilai tradisional dan kebutuhan-kebutuhan lembaga pendidikan untuk berubah.

¹⁵ Danny Meirawan, *Op. Cit.* Hlm. 13

¹⁶ *Ibid*

4. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan antara dukungan kepada lembaga pendidikan melalui kemitraan dan tekanan kepada pihak lembaga melalui monitoring.
5. Tujuan penjaminan mutu adalah untuk mencapai mutu lembaga pendidikan melalui pengembangan dan akuntabilitas.

Proses penjaminan mutu yang baik adalah yang dapat memberikan keterangan yang transparan terhadap apa yang telah dilakukan terkait dengan program kerjanya. Adanya mitra akan memberikan tambahan informasi yang cukup untuk tumbuh kembangnya suatu penjaminan mutu yang baik. Oleh karena itu, penentuan visi dan misi yang jelas akan memberikan arah kemana lembaga itu mau dibawa. Jika penetapannya terlalu jauh dari realita sementara ketersediaan lembaga tidak memadai, maka akan menjadi bumerang bagi lembaga itu sendiri.

Strategi berfokus pelanggan mengharuskan kita untuk secara terus-menerus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meninjau kebutuhan tersebut dan menciptakan respons membangun kepada mereka. Selain itu tujuan dan sasaran harus mengidentifikasi apa yang diinginkan organisasi untuk mencapai dan mengukur selama tiga bulan pertama, enam bulan pertama dan setahun pertama¹⁷.

Tujuan utama dari adanya penjaminan mutu diantaranya untuk memberikan jaminan terhadap mutu lembaga pendidikan khususnya bagi mahasiswa umumnya yang harus diberikan pelayanan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhannya. Adakalanya kebutuhan itu berupa informasi dan pelajaran yang cukup dan ditambah dosen yang kompeten serta tenaga kependidikan yang cekatan, cepat dan memberikan pelayanan prima.

Proses penjaminan mutu perguruan tinggi, diperlukan usaha yang sistematis dan cermat guna tercapainya setiap program yang hendak dicapai dan tentunya sesuai dengan harapan mahasiswa dan walinya. Sementara untuk mencapainya, Direktorat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi¹⁸:

¹⁷ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, 2009, *Education Management*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 522

¹⁸ Direktorat Penjaminan Mutu, *Tupoksi Direktorat Penjaminan Mutu*, diakses tanggal 25 November 2016 pada <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

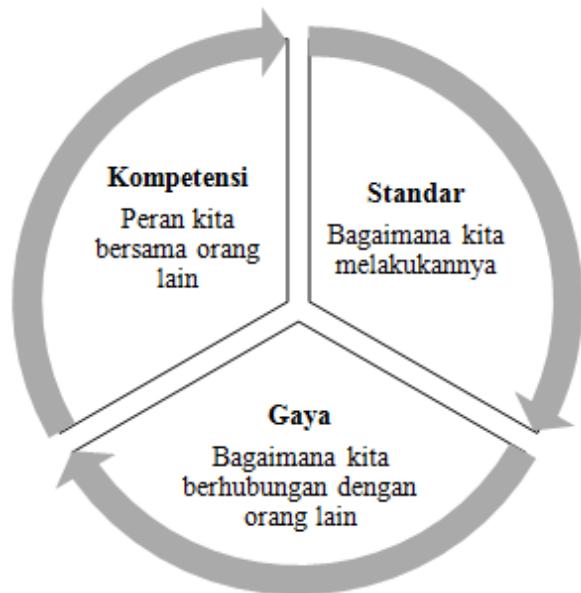
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan.
2. Fasilitasi di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Tiga hal yang perlu dipertimbangkan untuk merumuskan kebijakan mutu diantaranya pengembangan sistem mutu terpadu melalui komponen dan elemen perguruan tinggi, penguatan mutu dengan melalui serangkaian pengawasan yang tertata dengan baik serta kompetensi lulusan yang diharapkan muncul bibit ilmuwan yang lahir dari suatu PTKI dengan tentunya harus memiliki dosen atau tenaga pendidik yang kompeten pula. Oleh karena itu, untuk merealisasikannya harus dilakukan fasilitasi yang memadai dalam rangka mewujudkan sistem penjaminan mutu yang handal.

Secara umum bagian-bagian yang terlibat untuk menjalankan mutu dengan mengedepakan kompetensinya, maka diperlukan pengendalian yang baik dan tertib. Pemberian aturan saja tidak cukup efektif meningkatkan mutu perguruan tinggi keagamaan Islam, namun perlu juga dilakukan penanaman kesadaran personal yang tertuang dalam *Brandingself* untuk menjalankan semua aktifitas berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing diri untuk menjadi lebih baik yang sesuai dengan kriteria.

Brandingself merupakan suatu proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, diantaranya adalah kepribadian, kemampuan atau nilai-nilai dan bagaimana stimulus-stimulus ini menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat

digunakan sebagai alat pemasaran. Dalam membentuk personal branding, terdapat tiga dimensi yang tergambar dalam gambar berikut¹⁹:



Gambar 5. Tiga Pembentuk Utama Personal Branding

Upaya *promoting* yang dilakukan semua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tentunya membeberkan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program unggulan yang dimiliki terutama dalam hal mutu keilmuan dan spiritualitasnya. Namun banyak ditemukan hal berbeda ketika mahasiswa telah masuk kepada lembaga tersebut, bahkan kondisi di lapangan tidak sesuai dengan promosi yang dilakukan. Hal tersebut kerap terjadi karena tidak tampak adanya *Personal Branding* atau *Brandingself* pada kampus secara kelembagaan dan individu atau civitas akademika pada umumnya.

Pandangan tentang mutu lebih banyak diarahkan pada pandangan normatif yang hanya melihat pada aspek ketercapaian ilmu belaka tanpa melihat pada aspek penting lainnya yaitu kompetensi yang tidak hanya sekedar tahu dan mempraktekkannya, namun mahasiswa juga harus bisa memberikan perannya terhadap orang lain dan masyarakatnya agar visi dan misi perguruan tinggi dapat tersampaikan pada masyarakat.

¹⁹ Mc. Nally & Speak (2002) dalam Cindy Yunitasari dan Edwin Japarianto, 2013, *Analisa Faktor-faktor Pembentuk Personal Branding dari C.Y.N*. Jurnal Manajemen Pemasaran. Vol. 1, No. 1 Tahun 2013. Hlm. 2

Penetapan standar juga menjadi poin penting dimana kriteria seorang pendidik, tenaga pendidik, tenaga administrasi, tenaga kebersihan bahkan yang bersifat struktural seperti pejabat juga harus memiliki standar mutu yang berkualitas. Karena standar menduduki posisi yang strategis dalam mewujudkan tercapainya mutu. Standar itu tidak hanya bagaimana menjalankan mutu kepada mahasiswa sebagai pelanggan, namun juga bagaimana sikap dalam menghadapi atasan, bawahan serta tenaga yang bekerja dalam naungannya.

Penjaminan mutu tidak hanya memfokuskan kepada kompetensi masing-masing insan perguruan tinggi keagamaan Islam, namun juga memfokuskan pada pelayanan yang memuaskan kepada mahasiswa sebagai pelanggan. Gaya berinteraksi kepada mahasiswa tidak bisa dianggap remeh, karena mereka membutuhkan standar keilmuan yang memadai serta pelayanan yang prima untuk bisa menggapai cita-cita yang diinginkan. Kadang kala ditemukan mahasiswa yang tidak dapat lulus tepat waktu karena tidak diberikannya pelayanan yang baik, juga terkadang pihak penyelenggara pendidikan belum mampu mendeteksi kesulitan belajar mereka sehingga tidak menutup kemungkinan mereka mengalami sebuah keputusasaan.

Tiga pembentuk utama *Brandingself* menjadi pengendali mutu yang efektif. Konsep tersebut berupaya menangkap visi dan misi yang ingin tercapai disamping mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat akan integrasi sains dan agama. Maka agar tercipta penjaminan mutu yang handal, personal branding ini mengajak mengenali tujuan yang telah dibuat serta secara sadar masing-masing insan agar mencoba memenuhi standar tersebut dengan tentunya adanya proses belajar yang serius yang bisa difasilitasi oleh perguruan tinggi untuk tenaga yang dimiliki serta memberikan seleksi yang ketat untuk tenaga baru yang sesuai dengan kebutuhan visi dan misinya.

Proses penjaminan mutu tidak akan berjalan dengan baik manakala tidak dilakukan pengendalian mutu. Pengendalian mutu di lain pihak memerlukan empat metode kendali yang didasarkan pada deteksi dan pencegahan. Pertama, standar kualitas yang kuat yang diarahkan untuk kebutuhan pelanggan harus pertama kali diidentifikasi, dicatat dan dipublikasikan. Kedua, harus ada proses penilaian penyesuaian diri secara adil dan obyektif terhadap standar ini. ketiga,

tindakan yang jelas harus diterapkan ketika standar ini tidak terpenuhi. Keempat, harus ada peningkatan standar tersebut yang berkelanjutan²⁰.

Pengendalian mutu lembaga pendidikan tinggi Islam pada saat ini mengalami peningkatan dimana semakin efektifnya posisi Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang memberikan pendampingan secara efektif pada proses pengendalian tersebut. Diantara salah satu bentuk peningkatan mutu tenaga pendidik yaitu diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan untuk *upgrading* pengetahuan yang terbarukan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri dan hal ini merupakan sumber motivasi paling besar bagi perkembangan profesionalisme seseorang. Hal ini karena pada saat tenaga pendidik mengikuti program pendidikan dan pelatihan, maka akan mendapatkan berbagai pencerahan atas sikap dan pola profesionalisme dalam profesi. Ini merupakan bentuk dukungan yang paling efektif untuk menyadarkan kepada semua pihak bahwa seorang pendidik sudah seharusnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan agar dalam dirinya ada tenaga pendorong untuk menjalani sebuah kegiatan hidup²¹.

Peningkatan mutu melalui program pendidikan dan pelatihan adakalanya memberikan bekal dan *upgrade* pengetahuan terbaru dalam kaitannya dengan kondisi terkini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Adakalanya juga dapat memberikan *recharge* yang sebenarnya telah diketahui, hanya saja ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kembali motivasi yang bisa saja terjadi pengikisan.

Pembekalan yang cukup akan membawa dampak yang signifikan pada tumbuh kembang mutu pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Melalui pembelajaran kepada lembaga lain yang telah berhasil menjalankannya ataupun mengenai standar yang telah ditetapkan untuk dilakukan perbandingan, maka akan memberikan semangat lebih untuk peningkatan mutu di lembaga tersebut. Dalam hal ini perlu juga PTKI melakukan proses *Benchmarking* agar menambahkan informasi terkait standar mutu yang baik.

²⁰ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Op. Cit.* Hlm. 510-511

²¹ Mohammad Saroni, *Op. Cit.* Hlm. 125-126

Benchmarking adalah suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. *Benchmarking* dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok, organisasi ataupun lembaga. Ada sebagian orang menjelaskan benchmarking sebagai uji standar mutu. Maksudnya adalah menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain, sehingga juga muncul istilah rujuk mutu²².

Suatu lembaga PTKI dapat melakukan studi banding kepada perguruan tinggi lain yang telah berhasil menjalankan mutu dengan baik untuk diambil pelajaran dan dilaksanakan. *Benchmarking* adalah salah satu bentuk upaya peningkatan mutu lembaga yang berupaya melakukan uji standar yang telah, sedang dan akan dikembangkan pada satuan lembaga pendidikan tinggi.

Dalam melakukan *Benchmarking*, perlu diperhatikan bagaimana standar mutu yang telah dirasakan khususnya dengan memperhatikan stakeholder yang menjadi pemakai lulusannya serta kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang dimiliki serta sarana dan prasarana untuk dilakukan evaluasi atas setiap kekurangannya. Penanaman mutu pada setiap warga civitas akademika adalah penting untuk menunjang semua visi dan misi yang efektif.

Perguruan tinggi sebenarnya telah lama memiliki tradisi *knowledge-sharing* (berbagi pengetahuan) yang direalisasikan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar, publikasi, mailing-list dan kegiatan bersama lainnya. Benchmarking sebenarnya bukanlah barang baru, karena kenyataannya selama ini sudah dijalankan, mungkin istilahnya saja yang baru muncul belakangan ini²³.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi Islam selama ini banyak mengalami peningkatan signifikan dimana upaya sharing knowledge dan saling bantu menantu demi perbaikan bersama perguruan tinggi Islam. Oleh karena itu, usaha-usaha harus terus dilakukan dengan terwujudnya pemimpin yang konsen dalam mutu, tenaga pendidik yang profesional, tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan prima menjadi kunci keberhasilan penjaminan mutu.

²² Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Op. Cit.* Hlm. 44

²³ *Ibid*

D. Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam tidak lepas dari adanya dorongan masyarakat yang ingin menyekolahkan putra putrinya dalam rangka meningkatkan kualitas individu mereka. Dalam kenyataannya, kondisi itu tidak sesuai dengan rencana dimana ruang pengendalian mutu belum sempurna yang berakibat kurangnya kompetensi lulusan jika dibandingkan perguruan tinggi umum yang lebih konsen di bidang yang ingin ditempuh.

Penjaminan mutu pada dasarnya menempati posisi penting untuk dilakukan perbaikan demi perbaikan agar mutu lembaga pendidikan tinggi Islam dapat berkembang dan bersaing dengan lembaga pendidikan manapun. Namun saat ini, lembaga penjaminan mutu di perguruan tinggi Islam telah banyak berbenah dengan giat melakukan *Benchmarking* dan *Brandingself* yang terus ditanamkan kepada seluruh civitas akademika yang harus dilakukan dan dipenuhi secara sempurna.

Dasar pelaksanaan manajemen mutu yaitu adanya pengendalian mutu yang baik dan dilakukan secara cermat dan terukur agar terbina suasana mutu yang baik juga dalam berperilaku sehari-hari. Oleh karena itu, seluruh insan perguruan tinggi Islam harus mampu menunjukkan dirinya menjadi yang terbaik dan berusaha menjadi yang terbaik untuk perkembangan pendidikan tinggi Islam yang membawa citra agama yang mampu berkembang secara profesional dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Anwar, Moch. Idochi, 2013, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006, *Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*, Jakarta: Ditjen Dikti
- Direktorat Penjaminan Mutu Dikti, 2016, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, Jakarta: Dit. Penjaminan Mutu
- Direktorat Penjaminan Mutu, *Tupoksi Direktorat Penjaminan Mutu*, diakses tanggal 25 November 2016 pada <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

- Engkoswara dan Aan Komariah, 2010, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Meirawan, Danny, *Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional Dalam Otonomi Pendidikan*. Makalah Konaspi VI. Bandung: UPI
- Mukhopadhyay, Marmar, 2005, *Total Quality Management in Education*, New Delhi: Sage Publication
- Mutohar, Prim Masrokan, 2013, *Manajemen Mutu Sekolah; Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. 1
- Nally, Mc. & Speak (2002) dalam Cindy Yunitasari dan Edwin Japarianto, 2013, *Analisa Faktor-faktor Pembentuk Personal Branding dari C.Y.N.* Jurnal Manajemen Pemasaran. Vol. 1, No. 1 Tahun 2013
- Rivai, Veithzal, dan Sylviana Murni, 2009, *Education Management*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 522
- Saroni, Mohammad, 2011, *Personal Branding Guru*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Sashkin, M. & K.J. Kiser, 1993, *Putting Total Quality Management to Work*, San Francisco: Berret-Koehler Publisher
- Usman, Husaini, 2009, *Manajemen; Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara

Penjaminan **MUTU** **DI PERGURUAN** **TINGGI ISLAM**

Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi

Kontributor:

Abdul Basith
Abdul Halim Fathani
Abdul Malik Karim Amrullah
Abdul Wahab Rosyidi
Alfin Mustikawan
Angga Teguh Prastyo
Aniek Rahmawati
Hafizuruddin
Berhamaddin Amak
Danial Hilmi
Erwin Raja Imansyah
Halim Zahidy
Imam Sugiharto
Indah Yuliana
Ismi Salma Angrean
M. Faizan Tharha
N. Zaini Matalah
Mohammad Mittahusyayian
Muhammad Hamzali
Muhammad Ifraim Esha
Muhammad Kausal Iham
Muhtadi Rahwan
Muhibbin
Muhyono
Nia Loli Siswanti
Nurul Yaqien
Slamet
Sugeng Listyo Prabowo
Syaikul Mustafa
Taufiq
Triyo Supriyatno

Persoalan mutu perguruan tinggi menjadi hal yang tidak terhindarkan. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi harus senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal ini tidak lain karena perguruan tinggi yang bermutu menjadi cerminan keberadaan sebuah bangsa. Perguruan tinggi yang bermutu akan sangat berpengaruh dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu. Dan, sumberdaya manusia yang bermutu tentu akan berpengaruh besar dalam membangun budaya dan peradaban sebuah bangsa. Indonesia sebagai bangsa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadi sebuah keharusan meningkatkan mutu perguruan tingginya jika ingin menjadi *the center of excellence and civilization*.



UIN-MALIKI PRESS
Jalan Gajayana 50 Malang 65142
Telepon Faksimilie: 0341-573225
e-mail: uinmalikipress@gmail.com
<http://press.uin-malang.ac.id>

ISBN: 978-623-1542-62-2



9 78623 1542622